

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017-2021**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

WINDY NOVELASARI

NIM 19133092

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

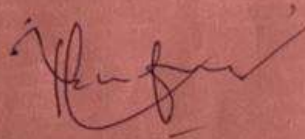
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017-2021

Nama : Windy Novelasari
NIM : 19133092
Program Studi : Akuntansi DIII
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
D III Akuntansi

Padang, Februari 2023
Disetujui Oleh
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP.198008092010121003



Fefri Indra Arza, SE, M Si, Ak
NIP.197302131999031003



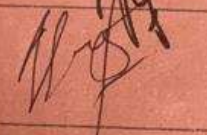
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SOLOK TAHUN 2017-2021

Nama : Windy Novelasari
NIM : 2019/19133092
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	(Ketua)	
2. Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windy Novelasari
Tahun Masuk/NIM : 2019/19133092
Tempat/Tgl Lahir : Selayo/06 Januari 2001
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Lurah Baruh, Jorong Lurah Nan Tigo, Selayo, Kecamatan
Kubung, Kabupaten Solok
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Solok Tahun 2017-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 24 Januari 2023



Windy Novelasari
NIM.19133092

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021

Windy Novela Sari

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok tahun 2017-2021 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi (2) Rasio Kemandirian (3) Rasio Efektivitas (4) Rasio Efisiensi dan (5) Rasio Ketergantungan. Terdapat permasalahan yaitu: 1) Pendapatan daerah belum sesuai dengan target anggaran 2) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok tahun 2017-2021 yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok ditinjau dari: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 6,82% dengan kriteria penilaian Sangat Kurang. (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 7,66% dengan kriteria penilaian Rendah Sekali. (3) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 97,62% dengan kriteria penilaian Tidak Efektif. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 87,12% dengan kriteria penilaian Cukup Efisien. (5) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 82,94% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Ketergantungan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021”** dengan baik serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh penjuru dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada kedua orangtua, Ayahanda Zulkanedi, Ibunda Yusnelly, Kakak penulis Widya, Adik penulis Viona, Tari, Keenan serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan do'a bantuan moril maupun material kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan waktu yang telah ditentukan.

4. Bapak Dr.Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Halkadri Fitra S.E.,M.M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Bapak dan Ibu dosen,staf pengajar dan karyawan program studi Diploma III FE UNP yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat penulis yaitu Cindy Monica,Novia Sandra,Winti Febrina,Yola Eka Saputri yang telah banyak memberikan dukungan dan saran kepada penulis selama perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya Diploma III Akuntansi 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Last but not least, I wanna thank me,I wanna thank me for believing in me,I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always been a giver and I trying to give more when I receive, I wanna thank me for trying to do more right and wrong, I wanna thank me for just being me at all time.

Semoga segala bimbingan,bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.Akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan,namun penulis

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 24 Januari 2023

Windy Novelasari
NIM.19133092

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
E. Kinerja Keuangan Daerah.....	9
1. Keuangan Daerah	9
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	9
3. 3.Pengelolaan Keuangan Daerah	10
4. Laporan Keuangan Daerah	12
F. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	15
G. Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	16
1. Analisis Rasio Keuangan	16
2. Kegunaan Analisis Rasio Keuangan.....	16
3. Jenis-jenis Rasio Keuangan	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	23
H. Bentuk Penelitian	23
I. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
1. Lokasi Penelitian	23
2. Waktu Penelitian.....	24
J. Rancangan Penelitian	24

1. Jenis Penelitian.....	24
2. Tahapan Penelitian	24
3. Objek Penelitian.....	26
4. Sumber Data Penelitian.....	26
5. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
K. Gambaran Umum Instansi.....	29
1. Sejarah Singkat Kabupaten Solok.....	29
2. Visi dan Misi	32
L. Pembahasan.....	32
1. Rasio Derajat Desentralisasi	32
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	35
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	38
4. Rasio Effisiensi Keuangan Daerah	41
5. Rasio Ketergantungan.....	44
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021	5
2. Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi	17
3. Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	19
4. Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah	20
5. Tingkat Effisiensi Keuangan Daerah	21
6. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	22
7. Perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021	33
8. Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021	35
9. Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021	39
10. Perhitungan Effisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok	41
11. Perhitungan Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Rasio Derajat Desentralisasi	35
2. Grafik Rasio Kemandirian	38
3. Grafik Rasio Efektivitas	41
4. Grafik Rasio Efisiensi	43
5. Grafik Rasio Ketergantungan.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2017 dan 2018.....	53
2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2018 dan 2019.....	55
3. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2020 dan 2021.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan kemudahan kontrol bagi pemerintah dibandingkan dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah (Dora, 2017).

Perubahan sistem pemerintahan juga membawa perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemerintah Daerah dalam berupaya

melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum (Susilawati et al, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Mardiasmo mengemukakan acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Abdul Halim mengatakan bahwa membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan APBD yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada setiap akhir tahun pemerintah daerah akan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan

menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan pengukuran analisis rasio keuangan, pengukuran *balanced scorecard*, dan pengukuran *value for money* (Munandar, 2017).

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal, 1994). Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilakukan atas hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja bidang keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja tersebut dapat berupa keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD (Sari, 2016)

Analisis laporan keuangan merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci (Mahmudi, 2016:89). Mahmudi (2016:13) mengungkapkan bahwa tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan, untuk itu perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan dengan menerjemahkan informasi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana

cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan serta mengetahui kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu, teknik analisis laporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya yang dapat digunakan yaitu, analisis derajat desentralisasi, analisis kemandirian, analisis efektifitas, analisis efisiensi dan analisis ketergantungan.

Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD dengan total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Halim, 2012).

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah (Mardiasmo, 2013). Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima (Mahsun, 2013). Rasio Ketergantungan menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. (Mahmudi, 2016).

Berikut pendapatan daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase
2017	Rp 1.174.654.996.220,00	Rp 1.144.553.785.047,73	97,44%
2018	Rp 1.203.924.288.807,00	Rp 1.163.604.738.667,08	96,67%
2019	Rp 1.282.592.257.180,29	Rp 1.254.704.484.574,82	97,81%
2020	Rp 1.221.792.650.267,00	Rp 1.139.147.681.879,33	93,28%
2021	Rp 1.231.792.650.267,00	Rp 1.216.306.520.994,31	98,78%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Sumatera Barat(2022)

Berdasarkan data di atas jumlah pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Solok yang dianggarkan dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan begitupun dengan realisasi pendapatan juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan persentase, realisasi pendapatan secara keseluruhan belum mencapai target yang dianggarkan. Dapat dilihat realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar 97,44% dari pendapatan yang dianggarkan selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 96,67%, tahun 2019 sebesar 97,81%, tahun 2020 sebesar 93,28% dan pada tahun 2021 hampir mencapai target pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar 98,78%.

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan terjadinya fluktuasi pada pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Solok, tetapi keseluruhan data pada tabel tersebut belum mampu menjelaskan apakah realisasi dan anggaran pada pemerintahan tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Penilaian kinerja dinilai berdasarkan rasio, apakah sudah termasuk rasio yang dikategorikan sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang dan sangat kurang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan analisis dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ketergantungan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas ?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Ketergantungan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi.
2. Untuk menganalisis tingkat Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian.
3. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas.
4. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi.
5. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Ketergantungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Untuk menemukan bukti empiris tentang derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan referensi dalam menganalisis derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Solok dengan menggunakan beberapa rasio. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa kesimpulan yang diambil atau dikemukakan, antara lain:

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai berdasarkan rasio derajat desentralisasi dari tahun 2017-2021, rata-ratanya ialah 6,82% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Solok masih sangat kurang dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan eksternal (Pemerintah Pusat dan Provinsi).
2. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2017-2021, rata-ratanya adalah 7,66% dan dikategorikan daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah sekali, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
3. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai berdasarkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021, rata-ratanya adalah 97,62% dan dikategorikan daerah dengan kemampuan keuangan yang tidak efektif karena kinerja Pemerintah Kabupaten Solok dalam mencapai target(anggaran) Pendapatan Asli Daerah tidak efektif.

4. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah dari tahun 2017-2021, rata-ratanya adalah 87,12% dan dikategorikan daerah dengan kategori cukup efisien karena belanja daerah melebihi anggaran yang tersedia.
5. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai berdasarkan Perhitungan rasio ketergantungan rata-ratanya adalah 82,94% dan dikategorikan sangat tinggi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang berkenaan dengan rasio-rasio kinerja keuangan yang mungkin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan mampu mengupayakan peningkatan dan penggalan Pendapatan Asli Daerah serta pendapatan yang lain untuk memaksimalkan pendapatan daerah, agar target pendapatan yang sudah dianggarkan dapat terealisasikan dengan sempurna, sehingga tidak ketergantungan terhadap bantuan sumber dana luar atau eksternal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Pengoptimalan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah. Pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sumber-sumber yang berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

dan retribusi daerah sehingga teroptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pemerintah Kabupaten Solok sebaiknya lebih adil dan profesional dalam mengalokasikan belanja. Dengan cara mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal serta meningkatkan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Solok dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperpanjang masa waktu penelitian dan menggunakan rasio serta variabel yang lebih banyak, serta ruang lingkup yang lebih luas lagi agar mampu menunjukkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Barat.(2022).Laporan Realisasi Anggaran <https://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data/dokumen/Kabsol-2017-2021.pdf> (diunduh tanggal 6 September 2022)
- Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol 4 No 3
- Dora,J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. 1-95
- Halim,Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta:UPP AMP YPKN,2001),hlm 23
- Halim,Abdul.2004.Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi).Yogyakarta:UPP AMP YPKN
- Kabupaten.Solok.2022.<https://www.solokkab.go.id/halaman/detail/sejarah-kabupaten-solok>(diakses pada 23 September 2022)
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga Cetakan Pertama* (3rd ed). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*,Cetakan I, (Yogyakarta:Penerbit Andi,2002), hlm 9-10
- Munandar, A. (2017). Dampak Akuras Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.*Tesis., Bandung, Program Pascasarjana:UIN Sunan Gunung Djati*
- Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah*,Cetakan kedua,(Makassar:Penerbit De La Macca,2018),hlm 263-264
- Pemerintah Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah.Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah